



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

2

SEPTEMBER 2025



RAKOR PEMBENTUKAN POS
BANTUAN HUKUM



TOT PENDAFTARAN MEREK
KOLEKTIF KEMENKUM



PENUTUPAN PELATIHAN
TEKNIS MANAJEMEN
KESEKRETARIATAN

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Sosialisasi Produk dari Bank BSI, Dorong Pegawai Bijak Berinvestasi



Banjarماسin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangka sosialisasi berbagai produk layanan perbankan syariah, Senin (9/9/25). Sosialisasi ini fokus pada pengenalan Tabungan Emas sebagai bentuk investasi jangka panjang serta program Tabungan Haji dan Umroh bagi pegawai.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel bersama pihak Bank BSI ini berlangsung interaktif. Para peserta diberikan penjelasan terkait manfaat Tabungan Emas yang memungkinkan masyarakat menabung dengan nominal terjangkau, sekaligus melindungi nilai aset dalam jangka panjang.

Selain itu, Gazali, selaku Powning Sales Officer BSI Kantor Cabang Kayutangi juga memperkenalkan program Tabungan Haji dan Umroh yang dirancang untuk memudahkan perencanaan keberangkatan ibadah ke Tanah Suci. Dengan skema tabungan syariah yang aman dan transparan, pegawai didorong untuk mulai merencanakan perjalanan ibadah secara lebih terstruktur.

Pihak Bank BSI menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan edukasi keuangan berbasis syariah, sekaligus mendukung budaya menabung dan berinvestasi di kalangan ASN.

Melalui kegiatan ini, pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, baik untuk tujuan investasi maupun perencanaan ibadah.



Kanwil Kemenkumham Kalsel Ikuti Webinar “Korporasi Risiko Tinggi”



Banjarmasin, AHU_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti webinar bertajuk “Korporasi Risiko Tinggi” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Selasa (9/9).

Kegiatan dibuka oleh Direktur Badan Usaha, Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., yang menekankan pentingnya transparansi korporasi dalam mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), maupun kejahatan finansial lainnya. Ia mengingatkan bahwa korporasi dengan struktur kepemilikan kompleks, sektor usaha rawan, serta kepatuhan administrasi rendah berpotensi tinggi dimanfaatkan untuk tindak pidana.

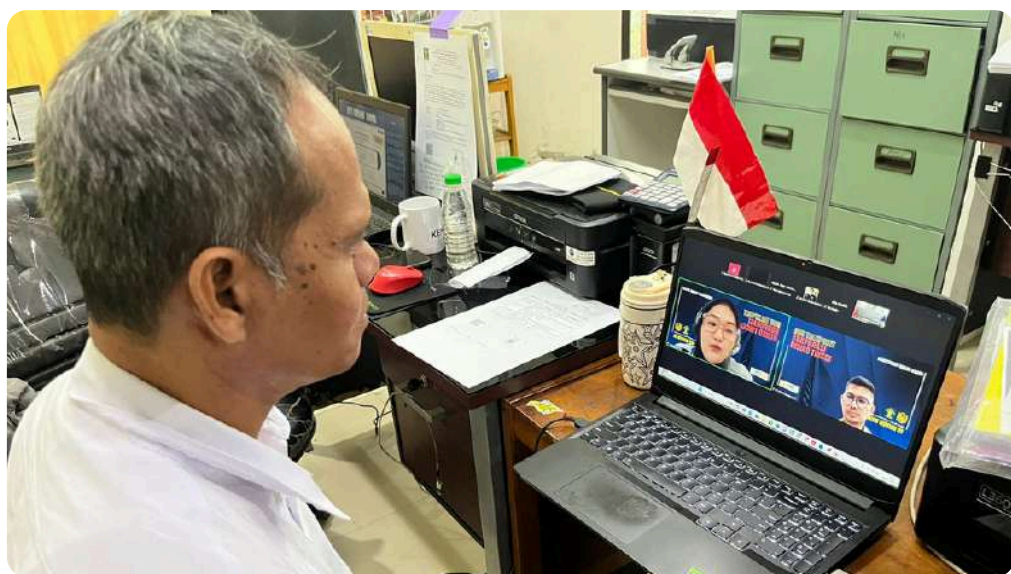
Dalam paparannya, Direktur juga menyampaikan data pertumbuhan Perseroan Terbatas (PT) yang terus meningkat dari 91.556 PT baru pada 2022 hingga mencapai total 1.477.208 PT terdaftar pada 2025. Namun, tercatat sekitar 1,1 juta korporasi belum melaporkan Beneficial Ownership (BO) dan karenanya telah diblokir dalam sistem administrasi badan hukum. Pemerintah saat ini tengah mengembangkan BO Gateway untuk memperkuat integrasi data dan transparansi kepemilikan.

Webinar menghadirkan tiga narasumber, yakni:

- Mardiansyah, M.E. (PPATK) yang membahas risiko TPPU dan TPPT pada korporasi;
- Andi Kurniawan, S.H., M.H., M.Kesos. (Direktorat Badan Usaha) yang menjelaskan potensi penyalahgunaan organisasi non-profit dalam pendanaan terorisme;
- Prihantoro Kurniawan, S.H., M.H. (Direktorat Badan Usaha) yang memaparkan urgensi transparansi pemilik manfaat (BO).

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta dari seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel.

Melalui partisipasi ini, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kalsel memperkuat pemahaman terkait risiko sektoral korporasi serta komitmen mendukung strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.



Bersinergi Membangun Daerah, Barito Kuala Gandeng Kanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Perlindungan Potensi Daerah



Marabahan, Humas_Info – Dalam rangka mendorong perlindungan dan pemanfaatan potensi Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Selasa (9/9) di Aula Mufakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Barito Kuala, Lasiman, dan diikuti oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Barito Kuala. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur pemerintah daerah serta memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum atas KI dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing lokal.

Dalam kesempatan tersebut, dua narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan materi penting. Eka Shanty Maulina, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, membawakan paparan tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Potensi KI pada Kabupaten Barito Kuala. Ia menekankan bahwa potensi daerah seperti produk khas dan budaya lokal harus segera dilindungi agar tidak diambil alih pihak lain, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Aji Rifani, Analis Kekayaan Intelektual, menyampaikan materi mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pengusaha Pemula dan UMKM. Ia menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah strategis untuk melindungi identitas usaha serta meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala semakin diperkuat dalam membangun kesadaran hukum, melindungi potensi daerah, serta memajukan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.



Pelatihan Manajemen Kesekretariatan Resmi Ditutup, Kabag TU dan Umum Harap Tingkatkan Kinerja Fasilitatif



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rustam Sakka, mengikuti secara daring penutupan Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum pada Selasa (09/09/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BDSM) Hukum Kementerian Hukum ini ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida.



Dalam sambutannya, Mutia Farida menegaskan bahwa Kabag TU dan Umum memiliki peran vital sebagai jantung administratif organisasi. Kompetensi mereka harus terus diperkuat agar adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, tanggap menghadapi tantangan birokrasi modern, serta profesional dalam menjalankan fungsi manajerial.

Pelatihan yang berlangsung selama 11 hari kerja ini dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis para Kabag TU dan Umum di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Para peserta diharapkan mampu menjadi motor penggerak tertib administrasi, efektifitas pengelolaan aset, serta kelancaran layanan dukungan manajemen di lingkungan kerja masing-masing.

Rustam Sakka menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan pelatihan ini, karena materi yang diperoleh sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas manajemen kesekretariatan dan tugas fungsi fasilitatif di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Penutupan ditandai dengan pembacaan peserta peringkat terbaik, serta doa bersama agar ilmu dan pengalaman selama pelatihan dapat diimplementasikan dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Silaturahmi dengan Jajaran RRI Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Alex Cosmas Pinem, melakukan kunjungan silaturahmi ke LPP RRI Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mendukung publikasi layanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana. Dari pihak RRI, hadir Kepala Stasiun LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriadi, bersama Kepala Tim Penyiaran RRI Banjarmasin, Yedi Yulistiadi. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat dilakukan ke depan.

Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi atas peran RRI sebagai media publik yang konsisten memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat.

“Kami melihat RRI sebagai mitra strategis dalam menyebarkan informasi tentang layanan hukum, khususnya agar masyarakat lebih memahami keberadaan Posbankum sebagai akses keadilan yang dekat dan mudah dijangkau,” ujarnya.



Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriadi, menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan kesiapan RRI untuk terus bersinergi dengan Kemenkum Kalsel. Ia menegaskan bahwa RRI terbuka untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat sinergitas antara Kemenkum Kalsel dan RRI Banjarmasin dalam memberikan informasi, edukasi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Angkat Peran Posbankum dalam Talkshow RRI Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel), Alex Cosmas Pinem, menjadi narasumber talkshow live di RRI Banjarmasin dengan tema “Peran Posbankum Mendekatkan Hukum ke Rakyat”.

Talkshow ini juga menghadirkan Lurah Kuripan Kota Banjarmasin, Yoyok Hardiyanto, yang menuturkan pengalamannya memanfaatkan Posbankum sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat. Melalui Posbankum, lurah berperan aktif menengahi konflik yang muncul sehingga dapat diselesaikan secara damai tanpa harus selalu berlanjut ke proses peradilan.

Dalam pemaparannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa Kemenkum berkomitmen menghadirkan Posbankum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.



“Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong sudah 100 persen terbentuk Posbankum. Dalam waktu dekat, SK Posbankum juga akan segera diserahkan untuk Kota Banjarbaru,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan empat layanan utama Posbankum, yaitu Layanan Informasi Hukum, Layanan Mediasi dan Negosiasi Hukum, Layanan Pendampingan Litigasi dan Non-Litigasi, serta Layanan Rujukan Advokasi. Menurutnya, kehadiran layanan ini menjadi bukti nyata bahwa akses masyarakat terhadap keadilan semakin terbuka dan dekat.

Talkshow berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, sekaligus menjadi sarana efektif dalam memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya Posbankum sebagai jembatan antara hukum dan masyarakat.

Kanwil Kemenkum Kalsel Kawal Ranperda Pemakaman Kabupaten Banjar Agar Selaras Hukum Nasional



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Pemakaman, Rabu (10/9) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Anton Edward Wardhana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Eryck Yulianto beserta tim perancang.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banjar, hadir Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Abdul Razak, jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKPLH) yang diwakili oleh Kabid Kawasan Permukiman Ali Ilyas dan Kabid Perumahan A. Rizqol, serta perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.



Dalam sambutannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya harmonisasi agar Ranperda yang disusun benar-benar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Pengelolaan pemakaman bukan hanya soal penyediaan lahan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia untuk dimakamkan secara layak, tata ruang daerah, hingga kelestarian lingkungan. Harmonisasi ini menjadi kunci agar regulasi yang lahir tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan dengan efektif di lapangan,” ujar Alex.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung Pemkab Banjar dalam memastikan substansi Ranperda Pemakaman sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dengan terselenggaranya rapat harmonisasi ini, diharapkan Ranperda tentang Pengelolaan Pemakaman Kabupaten Banjar dapat segera difinalisasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pemakaman yang layak, tertib, dan sesuai tata ruang daerah.



Lestari Budaya: Kemenkum Kalsel Dukung Festival Karya Tari Daerah Kalsel 2025



Banjarmasin, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, turut memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Festival Karya Tari Daerah (FKTD) Kalimantan Selatan Tahun 2025. Acara ini resmi dibuka pada Rabu (10/09/2025) bertempat di Gedung Balairung Sari UPTD Taman Budaya Banjarmasin.

Festival Karya Tari Daerah menjadi ajang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya-karya tari tradisional yang merepresentasikan identitas budaya lokal. Selain sebagai media ekspresi seni, kegiatan ini juga memiliki peran penting dalam pelestarian serta pengembangan kekayaan intelektual komunal, khususnya di bidang seni tari.

Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai kearifan lokal sekaligus menumbuhkan kreativitas berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Festival ini bukan hanya perayaan seni tari, melainkan juga upaya bersama untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi mendatang.



Perkuat Capaian Kinerja, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Evaluasi Triwulan III 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada Rabu (10/9) mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta percepatan pencapaian kinerja di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun daerah. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel hadir Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, pejabat manajerial, serta seluruh ketua tim kerja. Kehadiran jajaran tersebut menjadi wujud komitmen Kanwil Kalsel dalam mendukung agenda nasional peningkatan kinerja dan akuntabilitas Kementerian Hukum.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi yang telah diraih sekaligus menekankan pentingnya menjaga konsistensi pemenuhan data dukung RKT RB agar nilai yang telah diperoleh tetap terjaga. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran responsif dalam menindaklanjuti pengaduan dengan komitmen penuh dari pimpinan hingga pegawai. Selain itu, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya persiapan evaluasi AKIP Tahun 2025 oleh Kemenpan RB melalui aplikasi e-Sakip Reviu (ESR) yang harus dipenuhi paling lambat 15 September 2025. Tak hanya itu, realisasi penyerapan anggaran juga perlu mendapat perhatian serius, sementara kegiatan yang telah selesai dilaksanakan agar segera dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris masing-masing unit eselon I, yaitu Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Masing-masing menyampaikan capaian, evaluasi, serta langkah strategis yang akan ditempuh guna memperkuat pelaksanaan program kerja. Menanggapi hasil rapat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat kinerja.

“Kami di Kanwil Kalsel siap menindaklanjuti arahan Sekretaris Jenderal, terutama dalam pemenuhan data dukung, pengelolaan anggaran, dan percepatan pertanggungjawaban kegiatan. Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas kinerja dan memastikan pelayanan publik semakin optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum diharapkan semakin solid dalam meningkatkan kualitas kinerja, menjaga akuntabilitas, serta memperkuat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Kalsel Berpartisipasi dalam Penguatan Jabatan Analis Hukum yang Diselenggarakan BPHN

Banjarmasin, P3H_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Penguatan Jabatan Analis Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, pada Rabu, 9 September 2025, secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN; Dwi Agustine Kurniasih, Plt. Kepala Bidang Bina JF Analis Hukum BPHN; serta Dani R. Pinasang, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado.

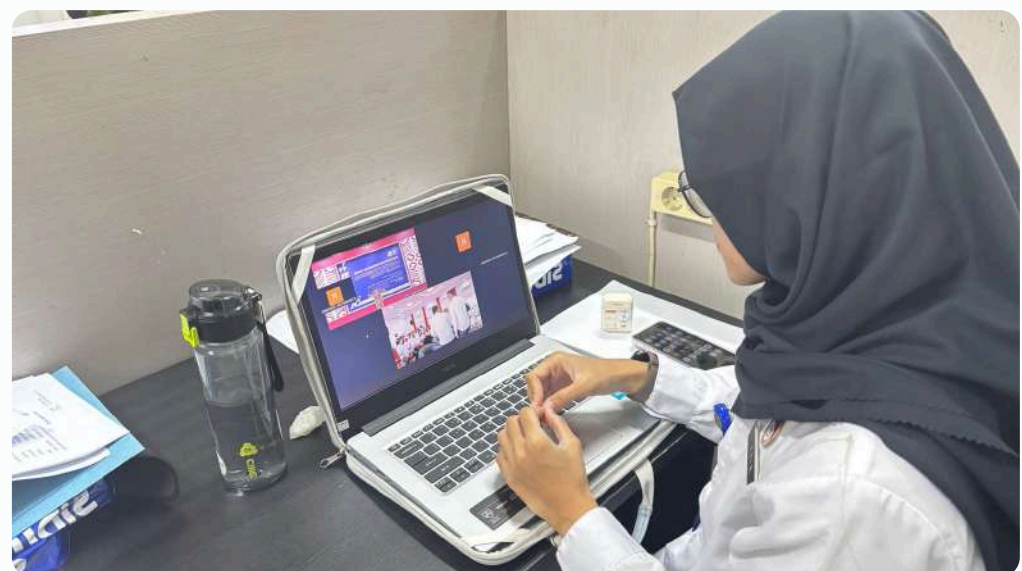
Dalam paparannya, Arfan menyampaikan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Menurutnya, tujuan utama analisis dan evaluasi regulasi bukan hanya mengurangi jumlah peraturan, tetapi meningkatkan kualitas agar lebih efektif, efisien, serta tidak menimbulkan multi-interpretasi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara analis hukum dengan perancang peraturan perundang-undangan guna memperkuat reformasi regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Dwi Agustine Kurniasih, yang akrab disapa Bu Utin, menegaskan bahwa seorang analis hukum perlu memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural.

“Kementerian Hukum sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum senantiasa merespons dinamika kebijakan pembinaan jabatan fungsional secara nasional dan siap menindaklanjuti melalui berbagai penyesuaian yang dibutuhkan,” jelasnya.

Dari sisi akademisi, Dani R. Pinasang menambahkan bahwa analisis dan evaluasi hukum merupakan langkah penting dalam menjaga konsistensi hukum di daerah agar tetap sejalan dengan sistem hukum nasional.

Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi melalui tim kerja analisa dan evaluasi yang dipimpin oleh Sri Yunita, Analis Hukum Muda. Kehadiran tim Kanwil Kalsel menunjukkan komitmen untuk mendukung penguatan jabatan analis hukum sekaligus berkontribusi dalam mendorong efektivitas regulasi di daerah.



Jadi Narasumber Sosialisasi Kekayaan Intelektual: Kanwil Kemenkum Kalsel Terangkan Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha

Banjar, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, Rabu (10/9).

Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjar. Kepala DKUMPP, I Gusti Made Suryawati, dalam sambutannya mengajak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman terkait HKI.

“Pergunakan momen ini dengan baik. Simak materi dari narasumber, dan apabila ada pertanyaan dapat langsung disampaikan agar benar-benar paham,” ujarnya.



Kanwil Kemenkum Kalsel terus mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dan karya mereka agar terlindungi secara hukum. Dengan terdaftarnya merek, pelaku usaha akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, membedakan produk dari kompetitor, mempermudah promosi dan pemasaran, meningkatkan nilai jual produk, serta melindungi hak atas kekayaan intelektual pemiliknya.



Bertindak sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, Dianor, menyampaikan materi mengenai pentingnya perlindungan HKI, khususnya merek bagi pelaku usaha.

“Merek yang didaftarkan harus memiliki ciri khas dan pembeda dari yang lain. Jika terdapat kemiripan dengan merek lain, maka permohonan bisa ditolak,” jelas Dianor. Ia menambahkan, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut sekaligus melarang pihak lain memakainya tanpa izin.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri ToT Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Banjarasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama Tim Layanan Kekayaan Intelektual, menghadiri kegiatan Training of Trainer (ToT) tentang Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Merek Kolektif Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis (11/9).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI beserta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual.

Dalam arahannya, Dirjen KI menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek kolektif bagi produk barang/jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal sekaligus mendorong daya saing koperasi dan UMKM di tingkat nasional maupun global.

Kanwil Kemenkum Kalsel menyambut baik kegiatan ToT ini sebagai bekal untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat desa, serta pelaku UMKM di Kalimantan Selatan dalam mendukung fasilitasi pendaftaran merek kolektif.

“Dengan adanya arahan ini, kami siap bersinergi bersama pemerintah daerah agar koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan dapat semakin mudah mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran merek kolektif,” ujar Riswandi.



Dua Ranperbup HSU Dibahas dalam Harmonisasi di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (11/9/2025). Rapat yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel ini membahas dua rancangan peraturan sekaligus, yakni Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Satuan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Desa dan Ranperbup tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Rapat dipimpin oleh Bahjahtul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel serta diikuti oleh para Perancang Kanwil Kemenkum Kalsel. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hadir Rijali Hadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, M. Yotawijaya selaku Sekretaris Dinas Kesehatan, serta Rusni selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten HSU.

Ranperbup Perubahan SPPD Desa disusun untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sekaligus memperkuat tertib administrasi penggunaan anggaran perjalanan dinas bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Sementara itu, Ranperbup Pelaksanaan Germas menjadi langkah penting Pemkab HSU dalam menindaklanjuti kebijakan nasional tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana diatur dalam Permen PPN Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 123 Tahun 2017. Aturan ini diarahkan untuk mendorong perilaku hidup sehat, deteksi dini penyakit, serta peningkatan kualitas lingkungan di daerah.

Bahjahtul Mardhiah dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa harmonisasi bukan hanya sekadar tahapan formal, melainkan proses penting untuk memastikan setiap aturan daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

“Kami memastikan setiap pasal yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan harmonisasi ini, Ranperbup HSU nantinya bisa menjadi instrumen hukum yang operasional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Bupati HSU kepada Kanwil Kemenkum Kalsel sebagaimana tertuang dalam surat resmi tertanggal 21 Agustus 2025. Hasil rapat diharapkan dapat menyempurnakan kedua Ranperbup agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan dapat segera ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang operasional.



Permudah Akses Keadilan, Posbankum akan Hadir di Seluruh Kelurahan Kota Banjarbaru



“Hal ini akan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan supremasi dan reformasi hukum di wilayahnya,” ujar Alex.

POSBANKUM dihadirkan untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, menjadi wadah penyelesaian sengketa, hingga memberikan pendampingan hukum secara adil dan merata. Keberadaan POSBANKUM juga merupakan wujud nyata dari amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana turut menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM, agar keberadaan POSBANKUM dapat berjalan optimal. Bahkan, ke depan seluruh lurah di Kota Banjarbaru diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Peacemaker Justice Award.



Banjarbaru, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) serta Surat Tanda Register POSBANKUM untuk seluruh kelurahan se-Kota Banjarbaru kepada Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby pada Kamis (11/09/2025) bertempat di Kediaman Wali Kota Banjarbaru.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana beserta Tim Penyuluh Hukum, dan disambut oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby bersama jajaran Staf Ahli, Asisten, Kabag Hukum, serta perwakilan Camat Kota Banjarbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas dukungan penuh dalam pembentukan POSBANKUM. Dengan audiensi ini, Banjarbaru diharapkan menjadi daerah ketiga di Kalimantan Selatan yang memiliki POSBANKUM di seluruh kelurahan.



Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas audiensi dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Kalsel serta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan POSBANKUM dengan melibatkan OBH terakreditasi di Kota Banjarbaru. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan SK Pembentukan POSBANKUM dari Wali Kota kepada Kakanwil, serta penyerahan Surat Tanda Register POSBANKUM seluruh kelurahan dari Kakanwil kepada Wali Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pembangunan hukum di daerah, sekaligus memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan bantuan hukum.

Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum: Tidak Ada Lagi Ego Sektoral



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali memperkuat sinergi kerja sama lintas sektoral melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) dan perjanjian kerja sama (PKS). Kali ini, Kemenkum menandatangani kerja sama dengan 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk semangat kolaborasi dari jejaring kerja nasional yang solid.

"Penandatanganan NK hari ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, tentu ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di gedung Kemenkum, Kamis (11/09/2025).

Menkum mengatakan dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 yang lalu, Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk menjadikan bangsa ini kuat, mandiri, berdaya saing, dengan defisit fiskal yang terkendali dan target APBN berimbang pada 2028.

"Arahan tersebut adalah sinyal kuat bahwa setiap kementerian dan lembaga tidak bisa lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bergerak terpadu dan saling melengkapi," tutur Menkum.

Penandatanganan kerja sama ini, lanjut Menkum, akan memberikan banyak manfaat strategis antara lain penguatan kepastian hukum, keterpaduan data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, respons cepat terhadap isu kebangsaan, dan penguatan ketahanan ideologi dan konstitusi.

"Saya berharap kerja sama ini menjadi pengingat kita, dengan melihat situasi global yang dinamis, bahwa diperlukan tindakan nyata dalam demokrasi yang jadi tanggung jawab kita sebagai sebuah kesatuan," tutur Menkum.

Menkum juga menegaskan bahwa keberhasilan nota kesepahaman ini tidak akan diukur dari tanda tangan pada dokumen semata, tetapi dari sejauh mana implementasinya berjalan di lapangan. Kementerian dan lembaga bersama Kemenkum perlu memastikan agar komitmen ini ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, target yang terukur, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta keterbukaan untuk memperbaiki jika ada kendala.



"Kolaborasi adalah kata kunci, dengan dinamika yang terjadi di luar dan dalam negeri, menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada lagi ego sektoral. Mari bekerja sama untuk saling menyukseskan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," tutup Menkum.

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman kali ini yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Intelijen Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga hari ini, Kemenkum telah melakukan penandatanganan kerja sama bersama 62 mitra kerja di tahun 2025, yang meliputi kementerian/lembaga, perbankan, dan universitas.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyambut langkah strategis yang dilakukan Kemenkum melalui penandatanganan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut adanya sinergi antarinstansi guna menghindari ego sektoral yang selama ini kerap menjadi hambatan.

"Kami di daerah tentu siap menindaklanjuti arah kebijakan ini dengan memastikan setiap bentuk kerja sama dapat diimplementasikan secara konkret, terutama dalam memperkuat kepastian hukum, pemanfaatan data yang terpadu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan sinergi yang solid, kita dapat menghadirkan layanan publik yang lebih efektif sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ungkap Alex.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham tentang Bantuan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan tentang Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum), Kamis (11/9) secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Divisi P3H Kemenkum Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling, Kepala Pusat Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, serta Ketua YLBH Ikadin Sumsel, Muhammad Daud.

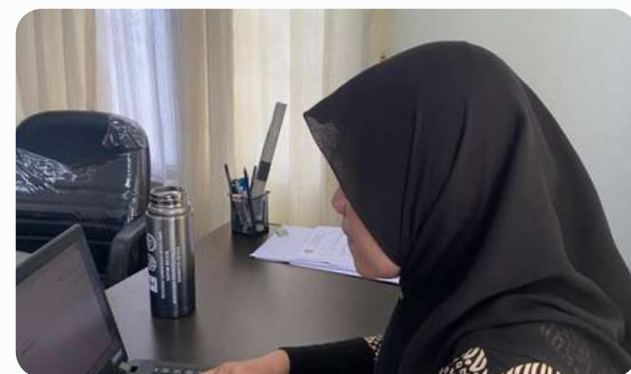
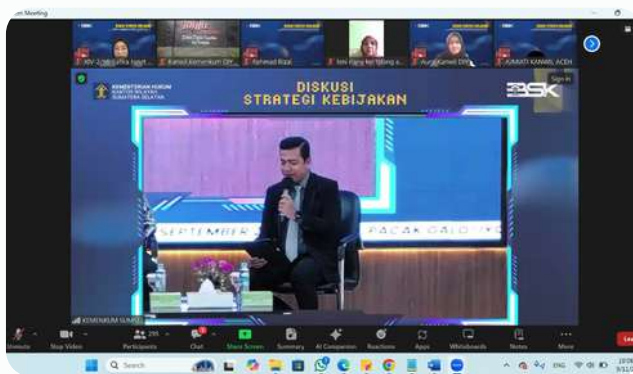
Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya penerapan standar layanan bantuan hukum untuk menjamin kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas pemberian layanan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, di antaranya minimnya sosialisasi, kurangnya asistensi dari BPHN, serta masih banyaknya pemberi bantuan hukum yang belum menyusun standar operasional sesuai ketentuan.

Sejalan dengan itu, BPHN bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia memiliki peran strategis untuk melakukan pengawasan, evaluasi, pemberian sanksi, sekaligus asistensi agar setiap pemberi bantuan hukum dapat memenuhi kewajiban penyusunan standar operasional bantuan hukum.

Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus dibarengi dengan dukungan nyata di lapangan.

“Standar layanan bantuan hukum merupakan jaminan negara agar masyarakat miskin mendapatkan keadilan yang setara. Untuk itu, BPHN bersama Kanwil Kementerian Hukum harus memperkuat asistensi, meningkatkan kapasitas pemberi bantuan hukum, dan memastikan sistem pendukung seperti Sidbankum berjalan optimal. Tanpa penguatan ini, regulasi tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan,” tegas Anton.

Melalui diskusi strategi kebijakan ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran pemberi bantuan hukum mengenai kewajibannya, serta mendorong terlaksananya layanan bantuan hukum yang lebih berkualitas bagi masyarakat miskin.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan KI dan AHU di Expo KUMKM Kota Banjarbaru 2025



Banjarbaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali hadir memberikan layanan langsung kepada masyarakat pada ajang Expo KUMKM Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, Kamis (11/9/25).

Melalui tim pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Kanwil Kemenkum Kalsel membuka layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi masyarakat umum, pelaku usaha, serta anggota koperasi yang memadati arena expo.



Expo Koperasi dan UMKM sendiri menjadi sarana promosi serta perluasan jaringan usaha, sekaligus wadah sinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan berbagai stake holder untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan ini, tim Kanwil memberikan penjelasan seputar prosedur dan persyaratan pendaftaran merek, desain industri, paten, serta hak cipta. Selain itu juga disampaikan edukasi mengenai pengelolaan izin usaha dan pendaftaran badan hukum yang menjadi fondasi penting bagi legalitas usaha.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, terutama dalam konsultasi terkait pendaftaran merek dagang dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Melalui dialog yang interaktif, tim menjelaskan bagaimana regulasi hukum dapat memberikan perlindungan atas produk kreatif masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing usaha di pasar.



Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam expo ini merupakan bentuk komitmen untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaku usaha memahami bahwa perlindungan hukum atas karya dan usaha mereka adalah investasi penting bagi keberlanjutan bisnis di era persaingan saat ini,” ungkapnya.

Dengan adanya partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan hukum, baik dalam bidang Kekayaan Intelektual maupun badan hukum usaha, sehingga UMKM lokal dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.

Kakanwil Kemenkum Kalsel Dorong Pembentukan Posbankum di Kabupaten Banjar

Banjar, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melakukan audiensi dengan Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, di kediaman Bupati Banjar pada Jumat (12/9/2025). Pertemuan ini bertujuan mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banjar.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil hadir bersama Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Banjar yang didampingi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kepala Bagian Hukum, serta Ketua Forum Kecamatan Kabupaten Banjar.



Kakanwil menekankan bahwa Posbankum merupakan program nasional dan prioritas Kementerian Hukum dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. Dari total 290 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar, seluruhnya diharapkan segera membentuk Posbankum.

“Posbankum akan memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan rujukan advokat, sehingga masyarakat tidak selalu harus menyelesaikan persoalan melalui jalur peradilan,” ujar Alex.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Banjar menyampaikan dukungannya penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum. Ia berkomitmen mendorong Kepala Desa dan Lurah agar segera menindaklanjuti pembentukan Posbankum di wilayahnya.

“Program ini tentu akan membawa dampak positif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Banjar,” ungkapnya.



Sebagai tindak lanjut, teknis pembentukan Posbankum akan dikoordinasikan bersama oleh Kanwil Kemenkum Kalsel, Dinas PMD, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar. Targetnya, seluruh 290 Desa/Kelurahan dapat memiliki Posbankum dalam waktu dekat.

Audiensi ini berjalan lancar dan penuh semangat kolaborasi antara Kemenkum dan Pemerintah Kabupaten Banjar demi menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Bersama BPHN

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dilaksanakan pada Jumat (12/9) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN menyampaikan strategi percepatan pembentukan Posbankum di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui pembagian zonasi dengan melibatkan JFT Analis Hukum, JFT Perancang, serta mendukung peran 4 JFT Penyuluh Hukum yang ada.

Selain itu, dibahas pula langkah-langkah strategis yang harus segera dilaksanakan, antara lain penyusunan SK Posbankum, SK Kadarkum, hingga penunjukan paralegal, serta rencana pelatihan paralegal pada Oktober mendatang. Keberlanjutan Posbankum juga akan dipantau secara berkala seiring dengan proses inisiasi MoU antara Kementerian Hukum, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri yang nantinya memberikan peluang pemanfaatan dana desa bagi Posbankum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan BPHN melalui koordinasi lintas instansi.

“Kami akan segera menginisiasi rapat koordinasi lanjutan dengan melibatkan Karo/Kabag Hukum, Dinas PMD, dan Dinas Administrasi Pemerintahan. Hal ini penting agar pembentukan dan keberlanjutan Posbankum di Kalimantan Selatan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan,” ujar Alex.

Rapat koordinasi ditutup oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN yang menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan diagendakan pada minggu depan guna memantau progres pembentukan Posbankum di daerah.



Dukung Pemberdayaan UMKM, Kakanwil Kemenkum Kalsel Turut Serta pada Expo Koperasi Banjarbaru



Banjarbaru, KI_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem turut menghadiri rangkaian kegiatan pembukaan Expo Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Dr. Murdjani, Kamis (11/09/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Koperasi dan Usaha Tenaga Kerja sebagai wujud komitmen dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Expo Koperasi dan UMKM ini menjadi sarana strategis untuk memperluas jaringan usaha sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan produk UMKM Banjarbaru semakin dikenal luas, mampu meningkatkan omset, membuka lapangan kerja baru, serta mendukung visi misi Banjarbaru yang elok, aman, damai, dan sejahtera.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, Expo melibatkan 20 dinas, instansi pemerintah, dan perbankan yang berperan aktif mendukung kerja sama serta mempermudah akses perizinan. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh 14 koperasi Merah Putih serta 100 UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Acara pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, yang sekaligus menyerahkan sertifikat merek kolektif Dahlia Barokah sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan hukum dan pengembangan usaha UMKM lokal.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui pemahaman pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, agar UMKM di Banjarbaru dapat terus tumbuh, naik kelas, dan bersaing di tingkat nasional hingga internasional.



SI DIYANK KALSEL Tembus 9 Besar Finalis KOMVAS Kota Banjarmasin 2025, Bukti Nyata Inovasi Digital Banua Melalui Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui inovasi digital SI DIYANK KALSEL (Sistem Aplikasi Data Inventarisasi Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Kalimantan Selatan). Inovasi ini berhasil menembus 9 besar finalis Kompetisi Inovasi (KOMVAS) Kota Banjarmasin Tahun 2025, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin.

Kegiatan seleksi tahap akhir berlangsung di Banjarmasin Command Center Pemko Banjarmasin pada Kamis, 11 September 2025, dengan peserta berasal dari berbagai kategori, yakni perangkat daerah Kota Banjarmasin, akademisi/pengajar, serta masyarakat umum. Inovasi SI DIYANK KALSEL sendiri digagas oleh Eka Shanty Maulina bersama tim, yang mewakili kategori masyarakat umum.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 000.9.5/2990/Bappeda Litbang/2025, panitia menetapkan SI DIYANK KALSEL sebagai salah satu nominator yang melaju ke tahap akhir penilaian presentasi inovasi. Keberhasilan ini dicapai setelah melalui penilaian ketat dari Dewan Juri yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi, dan perangkat daerah.



Adapun aspek penilaian meliputi: (1) Kebaruan (Novelty): aplikasi berbasis digital pertama di daerah yang secara khusus menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK); (2) Manfaat (Benefit): memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pencatatan KI Komunal; dan (3) Keberlanjutan (Sustainability): dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan pengguna terkait.

SI DIYANK KALSEL kini resmi masuk dalam daftar inovasi unggulan Banua yang akan bersaing di tahap presentasi akhir. Sesuai jadwal panitia, pengumuman pemenang akan dilakukan pada 18 September 2025.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen mendukung keberlanjutan inovasi ini, termasuk mendorong penerapannya di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal di Kalimantan Selatan.



Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Hadir di Hari Kedua EXPO KUMKM Banjarbaru 2025



Banjarbaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali membuka layanan konsultasi hukum pada hari kedua pelaksanaan EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Jumat (12/9/2025) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru.

Layanan hukum yang diberikan meliputi konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), seperti perlindungan hak cipta, pendaftaran merek, izin usaha, serta pendirian badan hukum. Masyarakat umum, pelaku usaha, hingga perangkat daerah Kota Banjarbaru memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai prosedur hukum secara langsung.

Pelayanan berlangsung lancar, dengan petugas memberikan penjelasan yang mudah dipahami sehingga pengunjung merasa terbantu. Kehadiran layanan ini pun mendapat sambutan positif dari peserta EXPO, yang menilai informasi hukum tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung pengembangan usaha mereka secara legal.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata Kanwil Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran KI dan AHU sebagai pondasi sah dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan Hukum di Hari Ketiga EXPO KUMKM Banjarbaru 2025



Banjarbaru, Yankum_Info – Memasuki hari ketiga gelaran EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali hadir memberikan layanan hukum bagi masyarakat, Sabtu (13/9) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru.

Tim Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel membuka konsultasi seputar Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta pelaku usaha. Para pengunjung yang sebagian besar berasal dari kalangan pelaku UMKM di bidang kuliner, kriya, dan produk kreatif tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka mendapatkan informasi, konsultasi, hingga pendampingan terkait proses pendaftaran KI dan layanan AHU secara mudah dan jelas.

Pelayanan berjalan lancar dengan respon positif dari masyarakat. Banyak pelaku usaha merasa terbantu dengan adanya layanan hukum yang mudah diakses di tengah kegiatan pameran. Hal ini sekaligus menunjukkan tingginya minat UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum bagi usahanya.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat serta mendukung perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Layani Konsultasi Hukum di Hari Keempat EXPO KUMKM Banjarbaru



Banjarbaru, Yankum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan masih membuka layanan hukum pada hari keempat EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Minggu (14/09/2025) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru.

Melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Kalsel menghadirkan konsultasi seputar layanan hukum yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, hingga perangkat daerah Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan secara praktis. Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya masyarakat dan pelaku UMKM yang datang untuk berkonsultasi dan meminta penjelasan terkait perlindungan KI maupun layanan AHU.

Petugas memberikan pelayanan secara komunikatif, dengan penjelasan yang mudah dipahami sehingga masyarakat merasa terbantu. Banyak pelaku usaha yang mengaku terbuka wawasannya mengenai pentingnya perlindungan hukum, terutama untuk karya dan produk usaha mereka.

Secara keseluruhan, partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel di EXPO KUMKM Banjarbaru 2025 mendapat apresiasi positif. Tingginya minat masyarakat membuktikan bahwa kehadiran layanan hukum di tengah kegiatan pameran UMKM menjadi sarana penting dalam mendekatkan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id